



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No 4 Umbulharjo Yogyakarta Telp. (0274) 562484, [www.kejati-diy.go.id](http://www.kejati-diy.go.id)

Nomor : B- 3 /M.4/Cr/1/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Penyampaian Laporan  
Triwulan IV Kejaksaan Tinggi  
D.I. Yogyakarta Tahun 2024

Yth.  
Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung  
Di-  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Kejaksaan Tinggi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Ahelya Abustam, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Madya NIP. 19660615 198603 2 001

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
2. Yth. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
3. Arsip.





# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

 @kejatijogja

 @kejatijogja

 kejatijogja

[www.kejati-diy.go.id](http://www.kejati-diy.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024 adalah Laporan Kinerja KL/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Triwulan IV adalah wujud dari Pencapaian Akuntabilitas Kinerja secara bekesinambungan dan terus menerus selama dua periode Triwulan dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan capaian Kinerja pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dari target capaian kegiatan dan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Dengan telah tersusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan per Triwulan terhadap capaian kinerja dari seluruh unit Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam peningkatan kualitas kinerja sehingga dapat memberikan reward dan punishment dan juga pelayanan terbaik bagi masyarakat menuju satuan kerja Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh Asisten serta Kabag TU dan pihak yang telah ikut membantu Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mencapai akuntabilitas kinerja sehingga ke depannya Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, Januari 2025  
Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta



Ahelya Abustam, S.H., M.H.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	01
DAFTAR ISI.....	02
BAB I PENDAHULUAN.....	04
A. Latar Belakang .....	04
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	05
C. Profil.....	06
BAB IV PERENCANAAN KINERJA.....	09
A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta 2020-2024.....	09
B. Rencana Kerja dan Anggaran .....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	18
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
B. Kendala dan Hambatan Serta Solusi Yang Dilaksanakan.....	39
BAB I PENUTUP .....	42



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga pemerintahan dibawah hierarki Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan dengan tagline dalam bekerja yaitu **CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel)**.

Dari amanat penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdapat 7 (tujuh asa) yaitu : Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan negara, Kepentingan Umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas, Laporan Kinerja ini adalah baguan dari azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan IV Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dan salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

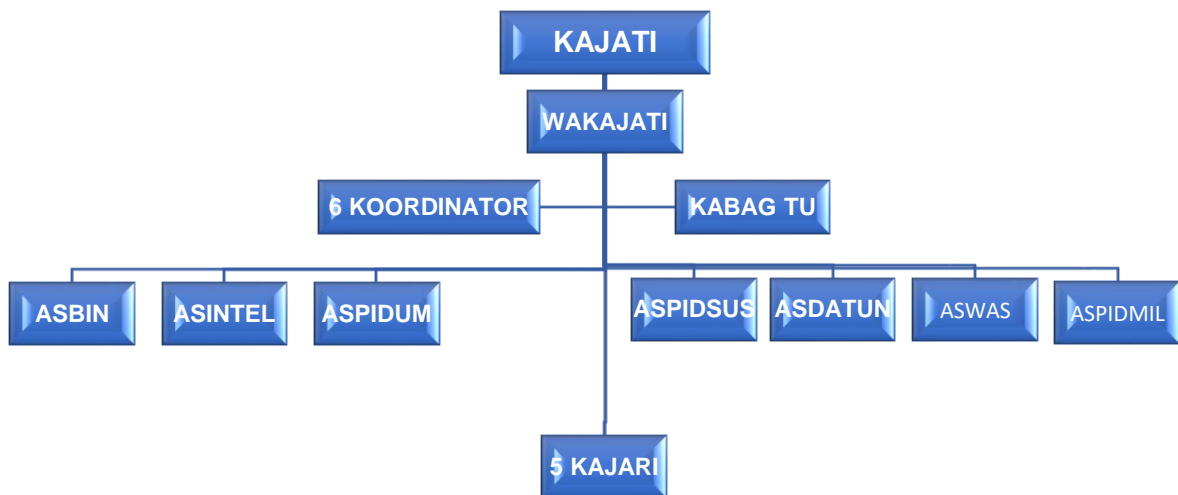
Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan yang terbaru Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimana Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum di ibu kota Provinsi D.I. Yogyakarta dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi Se-D.I. Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan yang bermartabat di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan tinggi.

### C. PROFIL



#### Pejabat Eselon IV :

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala Kejaksaan Tinggi       | : Ahelya Abustam, S.H., M.H. |
| 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi | : Dwi Antoro, S.H., M.H.     |

#### Pejabat Eselon IV :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Asisten Pembinaan                     | : Rakhmat Budiman Taufani, S.H., M.Kn   |
| 2. Asisten Intelijen                     | : Agus Rujito, S.H., M.H.               |
| 3. Asisten Tindak Pidana Umum            | : Agustinus Octovianus Mangotan, S.H.   |
| 4. Asisten Tindak Pidana Khusus          | : Muhammad Anshar Wahyuddin, S.H., M.H. |
| 5. Asisten Tindak Pidana Militer         | : Kolonel Kum Daswanto, S.H., M.H.      |
| 6. Asisten Pengawasan                    | : Romlan Robin, S.H., M.H.              |
| 7. Asisten Perdata dan tata Usaha Negara | : Fanny Widyastuti, S.H., M.H.          |
| 8. Kepala Bagian Tata Usaha              | : Ariana Juliastuty, S.H., M.H.         |

Pada wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) D.I. Yogyakarta memiliki 5 (lima) unit kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) yang melaksanakan tugas Kejaksaan di daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota.

## UNIT KERJA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Unit Kerja	Kedudukan	Daerah Hukum
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
Kejaksaan Negeri Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta
Kejaksaan Negeri Sleman	Sleman	Kabupaten Sleman
Kejaksaan Negeri Bantul	Bantul	Kabupaten Bantul
Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
Kejaksaan Negeri Kulon Progo	Wates	Kabupaten Kulon Progo



## BAB IV

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024, Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta bertekad untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Kejaksaan RI berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

Visi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024, yaitu:

“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

#### Penjelasan Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Hal	Arti
Andal	Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
	Segecap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang megarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI Tri Krama Adhyaksa, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.</li> <li>2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilihan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.</li> <li>3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.</li> </ol>
Inovatif	Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
Berintegritas	Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Misi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana.
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara.
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi (TI).

Sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI (dengan indikator persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian).
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang akuntabel, dan aparatur Kejaksaan RI yang berintegritas (dengan indikator meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin).
3. Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (dengan indikator persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi).
4. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana (dengan indikator persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi).
5. Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara (dengan indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata).
6. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI (dengan indikator persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya, yaitu:

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.
4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6. Diperlukan system complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

Dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan dan strategi Kejaksaan RI, sebagaimana Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, maka Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan RI di daerah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dengan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI.
5. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.
7. Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Kejaksaan RI di daerah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Sasaran program ini adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum.
3. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif.
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum.
5. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional.
6. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) secara transparan, akuntabel dan profesional.
7. Perbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat secara transparan, akuntabel dan profesional.
8. Perbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) berbasis teknologi informasi.
9. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
10. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.
11. Menyelesaikan Perkara Koneksitas dengan melibatkan Oditurat Militer sebagai pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer.

Target kinerja pada Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024, yakni:

SASARAN / INDIKATOR	TARGET				
	2020	2024	2024	2024	2024
Sasaran Strategis 1: <b>Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:					
Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian	30	40	50	75	90
Sasaran Strategis 2: <b>Meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:					
a. Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
b. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
c. Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
Sasaran Strategis 3: <b>Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:					
Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi	70	75	80	85	90

<b>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:					
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	90	92	95	97	99
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	70	75	80	85	90
<b>Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pengemD.I. Yogyakarta aset dan kerugian negara</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5:					
Persentase penyelamatan dan pengemD.I. Yogyakarta kerugian negara melalui jalur pidana	75	78	80	82	85
Persentase penyelamatan dan pengemD.I. Yogyakarta kerugian negara melalui jalur perdata	75	78	80	82	85
<b>Sasaran Strategis 6: Terwujudnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan</b>					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6:					
Persentase satuan kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	60	65	67	70	75

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melaksanakan 2 (dua) program kerja, sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2024	2024	2024	2024
	<b>BIDANG PEMBINAAN</b>						
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90
2.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
3.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK / WBBM	50	60	70	80	90
4.	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis berbasis TI	Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT Masterplan	15	30	50	75	95
5.	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85	87	90	92	95

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2024	2024	2024	2024
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85	87	90	92	95
	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>						
1.	Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI	Persentase laporan pengaduan terhadap aparatur Kejaksaan	100	80	70	50	25

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2024	2024	2024	2024
	<b>BIDANG INTELIJEN</b>						
1.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	10	15	20	25	30
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga / pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	10	15	20	25	30
	<b>BIDANG TINDAK PIDANA UMUM</b>						
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	10	15	20	25	30
2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>In kracht van gewisjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	75	80	85	90	95
	<b>BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS</b>						
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90

LAPORAN TRIWULAN IV KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2024	2024	2024	2024
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengemD.I. Yogyakarta kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	85	87	90	95	97
2.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai, dan pajak) yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	20	20	20	20	20
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	20	20	20	20	20
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	20	20	20	20	20
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap eksekusi	20	20	20	20	20
4.	Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) berbasis teknologi informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus lainnya secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	40	50	60	70	80

LAPORAN TRIWULAN IV KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2024	2024	2024	2024
	<b>BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA</b>						
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase penyelesaian pemberian pertimbangan hukum	80	85	90	95	100
		Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata	80	85	90	95	100
		Persentase penyelesaian penanganan perkara tata usaha negara (TUN)	60	70	80	90	100
2.	Meningkatnya pengemD.I. Yogyakarta kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengemD.I. Yogyakarta kerugian negara melalui jalur perdata	75	77	78	79	80
	<b>BIDANG PIDANA MILITER</b>						
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Koneksitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan	80	85	90	95	100
		Persentase penyelesaian penanganan perkara Koneksitas	80	85	90	95	100

## B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, seperti tersebut di bawah ini:

**Tahun 2024**

No.	Nama Program	Pagu (Triwulan III) 2024 (Rp)	Pagu (Triwulan IV) 2024 (Rp)
01	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	79.797.300.000	83.827.865.000
02	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	1.500.500.000	3.475.500.000
03	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan	241.000.000	241.000.000
04	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan	409.356.000	409.356.000
05	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	107.180.000	107.180.000
06	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas	1.901.560.000	1.486.660.000
Total		84.136.896.000	89.547.561.000

### C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan sebagai pemberi amanah kepada pejabat struktural di bawahnya sebagai penerima amanah, untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan sebagai pemberi amanah dan pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pimpinan struktural di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ditetapkan dengan target kinerja sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN IV KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian	40
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	85
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	85
		Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	55
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	75
5.	Meningkatnya PengemD.I. Yogyakarta Aset dan Kerugian Negara	Persentase penyelamatan dan pengemD.I. Yogyakarta kerugian negara melalui jalur pidana	78
		Persentase penyelamatan dan pengemD.I. Yogyakarta kerugian negara melalui jalur perdata	78
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi	65



**BAB IV****AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Negeri seluruh D.I. Yogyakarta dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2024, berikut ini uraian Realisasi Anggaran dan capaian kinerja capaian keluaran (output) Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;

**Realisasi Anggaran Triwulan IV  
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	83.362.373.295
2.	Pembangunan Sarpras	2.818.971.000
3.	Pengawasan Aparatur	221.742.000
4.	Penanganan Lid/Pam/Gal	409.206.700
5.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	100.826.300
6.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara	1.319.951.600
<b>TOTAL</b>		<b>88.233.070.895</b>

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 yang memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang diukur menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian

2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase satuan kerja kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi informasi

## 1. SASARAN STRATEGIS 1:

### Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	40 %

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :

*Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta  
yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian*

x 100

*Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta*

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 304 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 161 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 143 orang

**Jumlah Jaksa dan Tata Usaha**

Jumlah Pegawai Triwulan IVI 2024		Jumlah Pegawai Triwulan IV 2024	
Jaksa	Tata Usaha	Jaksa	Tata Usaha
143	138	161	143

Dari jumlah tersebut sebanyak **183** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

**Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat**

NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	304	183	121

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{183}{304} \times 100 = 60.19\%$$

Dengan demikian capaian tersebut belum melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tahun 2024 yaitu sebesar 56.71 % dari seluruh Pegawai. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah CPNS pada tahun 2024 sehingga mempengaruhi persentase tersebut.

### 1. Program Dukungan Manajemen

Program ini terdiri dari kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Pengawasan Aparatur Kejaksaan, Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Terhadap Program Dukungan Manajemen Capaian Output Kinerja berdasarkan masing masing Rincian Output dari Triwulan IV sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

#### Layanan Perkantoran

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%
	<b>Layanan Perkantoran</b>		<b>Bulan Layanan</b>		
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	1	Layanan	1	100

#### Layanan Umum

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		<b>Bulan Layanan</b>		
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	1	Layanan	1	100

b) Pengawasan Aparatur Kejaksaan

#### Layanan Pengawasan Internal

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%
	<b>Pelaksanaan Inspeksi</b>		<b>Dokumen</b>		
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	1	Dokumen	7	700

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IVIII	
				JUMLAH	%
	<b>Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi</b>		<b>Dokumen</b>		
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	9	Dokumen	6	66

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IVIII	
				JUMLAH	%
	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus		Dokumen		
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	4	Dokumen	3	75

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI, dengan indikator capaian berupa persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI, diukur dengan rumus sebagai berikut:

**Rumus Hitung:**

$$\frac{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan}} \times 100\%$$

**Perhitungan:**

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

Berdasarkan data capaian keluaran Layanan Pengawasan Internal, maka diperoleh hasil perhitungan berupa angka persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dalam Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN IV
Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	65%	75%

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada laporan pengaduan yang belum selesai namun masih dalam proses pemeriksaan. Kendala yang dihadapi adalah kondisi pandemi covid- 19 yang masih melanda wilayah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sehingga menjadi penghambat pemanggilan terhadap saksi dan terlapor untuk dilakukan kegiatan klarifikasi dan inspeksi kasus, sehingga kondisi tersebut membatasi mobilitas jajaran bidang pengawasan dan pihak terkait yaitu pelapor dan saksi.

Tabel

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan Periode Triwulan IV Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	Triwulan IV Tahun 2024		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan III	0	0	0
3.	Golongan IV	0	0	0
4.	Golongan I	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

NO.	JENIS HUKUMAN	Triwulan IV Tahun 2024		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	0	0	0
2.	Sedang	0	0	0
3.	Berat	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan  
Sampai Dengan Periode Trwiulan I Tahun 2024

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan IV Tahun 2024		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	0	0	0
3.	Perbuatan tercela lainnya.	0	0	0
4.	Perdata.	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan IV Tahun 2024		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat LebihRendah.	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	0	0
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0

Layanan Sarana Internal

C). Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran 2024, Kejaksaan Tinggi ditargetkan Pembuatan Pos Pemilu dikarenakan memasuki tahun politik dan persiapan Pemilu Presiden Tahun 2024

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%
1	Pembuatan Pos Pemilu				
	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	1	Unit	1	100%

## 2. SASARAN STRATEGIS 3 :

### Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80%

*Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi*

*X 100*

*Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.*

**Perhitungan**

17

———— X100= 40,47%

42

### 1. Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Negeri se D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut :

#### A) Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan

##### a) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%
	Buron Tindak Pidana / DPO yang Ditangkap	-	Orang	-	-	-	-
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	2	Orang	1	50	2	100

**b) Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat**

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	-	Laporan			-	-
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	2	Laporan	1	50	2	100

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen		Laporan				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	3	Laporan	2	66,67	3	100

**c) Pemantauan Produk**

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	-	Laporan			-	
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	5	Laporan	3	60	6	100

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Pengamanan Pembangunan Strategis	-	Laporan			-	
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	6	Laporan	4	66.66	6	100

**B) Penerangan dan Penyuluhan Hukum**

a) Pelayanan Publik Kepada Lembaga

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum	-	Lembaga			-	-
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	3	Lembaga	1	33.33	3	100

b) Pelayanan Publik kepada Masyarakat

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Penyuluhan Hukum		Orang			-	-
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	550	Orang	214	38.90	550	100

c). Jaksa Masuk Sekolah

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Realisasi	
			Triwulan III	Triwulan IV
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	Jaksa Masuk Sekolah	6 Kegiatan	12 Kegiatan

d). Jaksa Menyapa

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Realisasi	
			Triwulan III	Triwulan IV
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	Jaksa Menyapa	4 Kegiatan	6 Kegiatan

e) Pelayanan Media dan Kehumasan

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi Triwulan III			Realisasi Triwulan IV		
			Kegiatan	Jumlah yang hadir	Persentase	Kegiatan	Jumlah yang hadir	Persentase
1	Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	60 Orang	4	40	66%	6	60	100%

**C) Pelayanan Hukum Gratis**

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12	Bulan Layanan				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	12	Bulan Layanan	9	75	12	100

**3. SASARAN STRATEGIS 4 :  
MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target
2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	92%
3. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.

**Penerangan Perkara Pidana Umum**

**Perkara Hukum Perseorangan**

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Perkara Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan		Perkara				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	250	Perkara	112	44,8	250	100

**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	1	Laporan				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	12	Laporan	6	50	12	100

### Penanganan Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya

#### Perkara Hukum Perseorangan

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahap PENYELIDIKAN	-	Perkara	-	-		
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	5	Perkara	2	40	5	100

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%		
	Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahap PENYIDIKAN	-	Perkara	-	-		
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	5	Perkara	2	40	5	100

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap PRA PENUNTUTAN dan PENUNTUTAN	-	Perkara				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	2	Perkara	-	-	2	100

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai	-					
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	-	Perkara	-	-	-	-

#### Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

NO.	RINCIAN OUTPUT (RO) PER SATKER	TARGET SETAHUN	SATUAN	CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN III		CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%		
	Dukungan Manajemen Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya		Laporan				
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	5	-	3	60	5	100

#### 4. SASARAN STRATEGIS 5 :

##### MENINGKATKAN PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

#### A.) Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana.

X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan IV  
Tahun 2024

No.	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	-	-	-
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-

3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
4.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
5.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	-	-
6.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksaan se D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar % dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. -}}{\text{Rp. -}} \times 100 = \text{-\%}$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah mencapai target

Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara dari penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara	
		Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Rp)	Eksekusi (Rp)
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	-	

**B) .Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2)

Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN Periode  
Triwulan IV Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	BANKUM		TIMKUM		GAKKUM		THL		YANKUM	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	7	7	21	11	-	-	-	-	4	4

Keterangan :

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bankum : Bantuan Hukum      | 4. THL : Tindakan Hukum Lain |
| 2. Timkum : Pertimbangan Hukum | 5. Yankum : Pelayanan Huk    |
| 3. Gakkum : Penegakan Hukum    |                              |

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata dan TUN Periode  
Triwulan IV Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing
1	KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA				

## 5. SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

INDIKATOR	TARGET
Persentase satuan kerja kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi informasi	85%

Sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI berupa terwujudnya optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan RI dengan indikator sasaran strategis terhadap presentase satker Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dengan penggunaan Case Management System (CMS) Bidang Pidana Umum dari 23 satuan kerja telah mencapai 100%. Untuk bidang pidsus penerapan CMS telah mencapai 85% dari 23 satuan kerja wilayah D.I. Yogyakarta.

### REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tahun anggaran 2024 dan untuk mencapai target Sasaran Program/ Kegiatan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 89.547.561.000 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dibagi pada 6 (enam) aktivitas, sebagai berikut :

	<b>83.362.373.295</b>
	<b>2.818.971.000</b>
	<b>221.742.000</b>
	<b>409.206.700</b>
	<b>100.826.300</b>
	<b>1.319.951.600</b>
	<b>88.233.070.895</b>

## REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

## KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

No.	Nama Program	Pagu Triwulan III 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan III 2024 (Rp)	%	Pagu Triwulan IV 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan IV 2024 (Rp)	%
01	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	79.797.300.000	27.241.740.480	34.13	83.827.865.000	83.362.373.295	99.4
02	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	1.500.500.000	426.891.000	28.44	3.475.500.000	2.818.971.000	81.1
03	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan	241.000.000	7.603.000	3.15	241.000.000	221.742.000	92
04	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan	409.356.000	0	0	409.356.000	409.206.700	99.96
05	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	107.180.000	3.000.000	2.79	107.180.000	100.826.300	94.07
06	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas	1.901.560.000	35.291.450	1.85	1.486.660.000	1.319.951.600	88.78

LAPORAN TRIWULAN IV KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama Program	Pagu Triwulan III 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan III 2024 (Rp)	%	Pagu Triwulan IV 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan IV 2024 (Rp)	%
	Total	84.136.896.000	27.714.525.930	32.93	89.547.561.000	88.233.070.895	98.53

## 6. SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

INDIKATOR	TARGET
Persentase satuan kerja kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi informasi	85%

Sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI berupa terwujudnya optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan RI dengan indikator sasaran strategis terhadap presentase satker Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dengan penggunaan Case Management System (CMS) Bidang Pidana Umum dari 23 satuan kerja telah mencapai 100%. Untuk bidang pidsus penerapan CMS telah mencapai 85% dari 5 satuan kerja wilayah D.I. Yogyakarta.

### ***B. KENDALA DAN HAMBATAN SERTA UPAYA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN***

#### **1. Kendala / Hambatan**

- a) Penggunaan Zoom Meeting (virtual) dalam kegiatan Penyuluhan Hukum mengakibatkan beberapa subkomponen pembiayaan kegiatan tidak dapat terserap seperti konsumsi peserta dikarenakan peserta berada di tempat masing-masing, begitu juga dengan pembiayaan spanduk.

#### **2. Upaya / Strategi / Solusi yang Dilaksanakan**

- a) Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berkoordinasi dengan Operator Zoom Meeting di masing-masing satuan kerja untuk dapat menyesuaikan jadwal kegiatan Penyuluhan Hukum.
- b) Melakukan revisi anggaran sehingga anggaran yang tidak dilakukan penyerapan anggaran tersebut dapat dialihkan menjadi subkomponen kegiatan lainnya atau membiayai kegiatan penyuluhan hukum lainnya.



## BAB I

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Capaian Kinerja, maka terdapat beberapa indikator yang harus dicapai dari perjanjian Kinerja pada masing masing satuan kerja, dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja ada beberapa kendala dan hambatan yang dapat menyebabkan Capaian kinerja pada beberapa kegiatan tidak sesuai dengan target, hal ini diakibatkan oleh beberapa hal :

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang harus turun ke lapangan tidak bisa dilaksanakan dan dilakukan secara Online.
2. Realisasi anggaran pada masing masing kegiatan tidak dapat terserap dengan maksimal dikarenakan kegiatan di lapangan tidak terlaksana.
3. Adanya *Automatic Adjustment* oleh Kementerian Keuangan pada DIPA Tahun 2024 yang telah mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran dan Capaian Output kegiatan pada Triwulan IVI.

Sehingga kami simpulkan bahwa target kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2024 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Kondisi penyebaran Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat di segala aspek. Selain pengarus-utamaan kegiatan dan anggaran yang ditujukan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, pandemi ini juga mempengaruhi cara interaksi sosial yang tidak dapat lagi secara leluasa dilakukan melalui tatap muka, sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan utama sekaligus keharusan bagi setiap institusi pemerintah termasuk Kejaksaan untuk terus bergerak dan berkarya dalam menunaikan tugas dan fungsi penegakan hukum yang diembannya.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tidak terlepas dari dukungan seluruh unsur pimpinan baik Pusat maupun di inrenal Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Kinerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Semoga Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dapat meningkatkan kinerja dan menjaga konsistensi dalam pelaporan yang akuntabel demi meningkatnya *Public Trust* terhadap penegakan hukum.